

LAMPIRAN

Lampiran Dokumen Masukan Sistem Berjalan

Lampiran A.1



SURAT GUGATAN

No. 10/B/PDT/11/2014/PN BANDUNG

Bandung, 15 Maret 2014

Kepada YTH :
Majelis Hukum
Pengadilan Negeri Bandung
Jl. Jaka Natura Bandung

Perihal : Gugatan Wanprestasi

Membertahukan Dengan Hormat :

1. Pirman Purwanto S.H., Pekerjaan Advokat, Alamat Jl Wayang No.12, Batubatu, Bandung.
2. Hars Mujahid S.H., Pekerjaan Advokat, Alamat Jl Jati No.30, Batubatu, Bandung

Seklu Kuasa, Karena demikian untuk atas nama Hasan Harri, yang beralamat di Batuanagal Blok. A No.1 Bandung, yang mengajukan dan menadatangani surat gugatan ini berdasarkan surat kuasa tertanggal 1 Maret 2014 yang seiniutnya di mohon sebagai tergugat :

Bawa penggugat mengajukan gugatan terhadap :

1. Sofi Larasati, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kp. Lemhang sari Kec. Lemhang Kab. Bandung, selaku istri dan ahli waris dari ahmad mulyanto, Sebagai Tergugat satu.
2. Hikmat Riadi, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat Kp. Lemhang sari Kec. Lemhang Kab. Bandung, selaku anak tunggal dan ahli waris dari ahmad mulyanto, Sebagai Tergugat dua.
3. Badan Pertanahan Kabupaten Bandung, Alamat Jl. Sunda No. 16 Bandung Barat, Sebagai turut tergugat satu.
4. Yanto Galihianto S.H, pekerjaan Notaris, Alamat Padalarang No. 12 Bandung Barat, Sebagai turut tergugat dua.

Adapun duduk perkara adalah sebagai berikut :

----- POSITA :

1. Bawa pada tanggal 19 januari 2014 Ahmad Mulyanto membuat iklan di Koran galamedia, dalam Koran yang di terbitkan oleh galamedia tersebut Ahmad Mulyanto Bemiat untuk menjual sebidang tanah di Kp.Lemhang sari Kec. Lemhang Kab. Bandung, yang hasnya 400M dengan harga 1.000.000Meter, Bersertifikat hak milik No. 442 yang di keluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Bandung. Kemudian

Lampira A.2



TEROBOSAN HUKUM HAKIM TERKAIT PENCABUTAN SURAT PENOLAKAN PERKAWINAN DALAM MASA IDDAH

Kajian Putusan Nomor 287/Pdt.P/2017/PA.TA

JUDICIAL BREAKTHROUGH ON THE REVOCATION OF MARRIAGE REJECTION LETTER DURING THE IDDAH PERIOD

An Analysis of Decision Number 287/Pdt.P/2017/PA.TA

Muhammad Faizi Arifin & Lukman Santoso
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo
Jl. Pramuka No. 158 Ponorogo Jawa Timur 63471
Email: mufaiziarifin22@yahoo.com dan lukmansantoso4@gmail.com

Naskah diterima: 2 Februari 2018; revisi: 20 November 2019; disetujui 19 Desember 2019

<http://dx.doi.org/10.29123/jy.v123.331>

ABSTRAK

Perkawinan dalam masa idah secara hukum tidak dapat dilakukan dalam masa idah. Berbeda halnya dengan Peraturan Menteri Agama Tahun 2017 Nomor 237/Pd/P/2017/PA.TA tentang pencabutan surat penolakan perkawinan dalam masa idah. Penelitian terhadap putusan ini dilakukan dengan studi kependidikan dengan pendekatan hermeneutik. Komponen dari putusan ini bahwa, dasar hukum yang digunakan majlis hakim yaitu Pasal 151 ayat (2) Huruf b K.HI. QS. At-Thalq ayat 4, serta Pasal 53 K.HI yang dikatakan dengan menggunakan metode pemecahan hukum (rechwingking), di antaranya: permasa, metode imbauan, dan metode perintah. Sedangkan untuk bukti idah belum akan segera idah quru'; Jadi metode *a contraria* (*argueon a contraria*) terhadap Pasal 153 ayat (2) huruf c K.HI, mengingat siapa pria yang menghimpang dengan wanita, sekaligus sedangkan dia memberi perintah untuk mencabut surat K.UA tersebut, dan ketiga sifatnya terhadap Pasal 53 K.HI untuk menghentaki bahwa di antara W (pemohon) dengan S (calon suami) tidak ada halangan untuk

menggunakan perkawinan.

Hal : Permohonan Dispensasi Kawin

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Yang bertanda tangan di bawah ini, Binti , umur tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir , Pekerjaan beralamat di Dusun Rt Rw Desa Kecamatan Kabupaten Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Dengan ini mengajukan permohonan dispensasi kawin atas nama anak Pemohon yang bernama;

Adapun duduk perkaryanya adalah sebagai berikut :

1. Bawa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Bin , di hadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Temanggung sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor: tertanggal dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a., lahir pada tanggal bulan tahun
 - b., lahir pada tanggal bulan tahun
2. Bawa anak kandung Pemohon yang bernama masih di bawah umur untuk persyaratan melangsungkan perkawinan, sampai saat ini baru berumur umur 18 (delapan belas) tahun 9 (sembilan) bulan;

SURAT KUASA INSIDENTIL

Berdasarkan Surat Izin Ketua Pengadilan Agama Bandung Nomor yang mengizinkan kepada Penerima Kuasa dari Pemberi Kuasa, maka :

Yang bertandatangan dibawahini :

Nefosmiyarni binti Tamisir, Umur 52 (Surabaya, 09 Maret 19), NIK : Pendidikan : S1, Agama Islam, Pekerjaan , Beralamat di , Rt.006 RW.012, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;

Nety, S.Si binti Tamisir Usman, Umur 42 (Bandung, 08 Oktober 19), NIK : Pendidikan : S2, Agama Islam, Pekerjaan Dosen, Beralamat di , RT.002 RW.007, Kelurahan Neglasari, Kecamatan Cikutra, Kota Bandung;

Untuk selanjutnya disebut PARA PEMBERI KUASA :

Dengan ini memberi kuasa kepada :

Nurmiah binti Zaher, NIK : Padang, 20 Agustus 19, umur 76 tahun, Pendidikan : SLTA, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di , RT.002 RW.007, Kelurahan Neglasari, Kecamatan Cikutra, Kota Bandung, untuk selanjutnya disebut PENERIMA KUASA;

Khusus

1. Untuk mendampingi atau mewallili serta membela hak kepentingan hulum pemberi kuasa selaku pemohon di Pengadilan Agama Bandung atas perlara Penetapan ahli Waris dari almarhum/almarhumah Tamisir bin Usman perlara mana telah didafar di Kepariatan Pengadilan Agama Bandung, tanggal dengan Register Perlara Nomor :;
2. Membuat, menandatangi dan menerima surat-surat, merubah gugatan/pemohonan dengan perkara ;
3. Menghadap/menghadiri persidangan-persidangan di Pengadilan Agama Bandung dalam upaya membela dan memperjuangkan hak dan kepentingan hulum pemberi kuasa dalam perlara tersebut diatas ;
4. Mengajukan alat bukti, pemohonan-permohonan, memberikan keterangan, bantahan-bantahan, mengadakan perdamuan dan dapat mengambil segala silap atau tindalan-tindalan yang dianggap penting dan perlu, serta berguna

Lampiran A.5

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat, Tgl lahir :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sebenar benanya bahwa saya memang benar telah kehilangan AKTA KELAHIRAN dan sudah saya cari tetapi tidak ketemu.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, apabila di kemudian hari terdapat kesalahan maka saya tidak akan menuntut pada Dinas Kependidikan dan Pencatatan Sipil Kota Malang dan pihak manapun.

Malang,
Yang bersangkutan

Materai 6000

Mengetahui, Ketua RW,

Mengetahui, Lurah
Lowokwaru

Mengetahui, Ketua RT,



Banyuwangi, 27 Juni 2016

Nomor : W13-A3/2489/Hk.03.5/VI/2016
Sifat : Penting
Lamp. : 1 (satu) eksemplar
Perihal : Akta Cerai

Kepada Yth.

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Banyuwangi
Jl. Adi Sucipto

Banyuwangi

Assalamu'alaikum wr wb

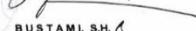
Menunjuk surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor W13-A/1620/HK.05V/2016 tanggal 18 Mei 2016 M perihal sebagaimana pokok surat dengan ini kami beritahukan bahwa:

Jika akta cerai untuk Pengugat/Pemohon atau Terugugat/Termohon hilang, berdasar surat permonahan dari Pengugat/Pemohon atau Terugugat/Termohon dengan dilampiri surat keterangan hilang dari Kepolisian, Pengadilan Agama dapat mengajukan fotokopi akta cerai yang dimiliki oleh pengadilan atau yang ada di Pengadilan Agama dan dilisisif oleh Panitia Pengadilan Agama dengan ditengarai bahwa fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan diterbitkan atas permonahan Pengugat/Pemohon atau Terugugat/Termohon untuk kepentingan menikah lagi atau kepentingan lainnya. (Permatikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1952 tentang Peraturan Untuk Menghadapi Kemungkinan Hilangnya Surat Keputusan Dan Surat-Surat Pemeriksaan Pengadilan).

Untuk jelasnya bersama ini kami kirim kopi surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor W13-A/1620/HK.05V/2016 tanggal 18 Mei 2016 M tersebut dan kopi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1952 di atas.

Demikian, atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

a.n. Ketua Pengadilan Agama
Banyuwangi
Panitra,

BUSTAMI, S.H.

Tembusan:
- Kepala KUA se-Kabupaten Banyuwangi
- Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi
sebagai laporan

Lampiran Dokumen Keluaran Sistem Berjalan

Lampiran A.6

LAPORAN KEUANGAN PERKARA PADA PENGADILAN AGAMA KARAWANG BULAN MEI 2020

LI.PA.7a

NO	URAIAN	JUMLAH		
		PENERIMAAN	PENGELUARAN	
1	2	3	4	
1	Sisa Awal	Rp. 182.839.350	Rp.	-
	Penerimaan bulan ini Penerimaan	Rp. 95.412.000	Rp.	-
2	bunga giro Pajak	Rp.	Rp.	-
3	Giro	Rp.	Rp.	-
4	Biaya	Rp.	Rp.	-
5	Panggilan	Rp.	Rp.	60.400.000
	Biaya	Rp.	Rp.	-
6	Penerjemah	Rp.	Rp.	-
	Biaya Sita	Rp.	Rp.	-
7	Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp.	Rp.	-
8	Biaya Sumpah	Rp.	Rp.	-
9	Biaya Pemberitahuan	Rp.	Rp.	-
1	Biaya Pengiriman	Rp.	Rp.	21.647.500
0	Perkara Biaya Materai	Rp. 278.251.350	Rp.	134.320.500
	Saldo Akhir			143.930.850
	Saldo Bank			103.141.989
	Saldo Kas			3.998.039
	Selisih	Rp.		

Catatan :

Mengetahui:

29 Mei 2020

Ketua Pengadilan Agama Karawang

Panitera

TTD

TTD

Dr. M. Basir.,M.H

Drs. E. Arifudin

NIP.196507021992031005

NIP.196311151993031004

**LAPORAN KEUANGAN
EKSEKUSI PADA PENGADILAN
AGAMA KARAWANG BULAN MEI 2020**

*Laporan ini telah dikonfirmasi tanggal 29-05-2020 10:56:35
LI.PA.7b*

NO	URAIAN	Jumlah	Jumlah
1	2		
1	Sisa Awal	Rp 3.734.000	Rp -
2	Penerimaan bulan ini Pengeluaran	Rp -	Rp -
3	ATK Eksekusi	Rp -	Rp -
	PNBP	Rp -	Rp -
	Biaya Panggilan	Rp -	Rp -
	Biaya Pemberitahuan	Rp -	Rp -
	Biaya Pelaksanaan	Rp -	Rp -
	Eksekusi Pengembalian Sisa Panjar Sisa Panjar	Rp -	Rp -
		Rp 3.734.000	Rp -
	Saldo Akhir	Rp	3.734.000

Mengetahui:

29 Mei 2020

Ketua Pengadilan Agama Karawang

Panitera

TTD

TTD

Dr. M. Basir.,M.H

Drs. E. Arifudin

NIP.196507021992031005

NIP.196311151993031004

Lampiran A.7

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DIPA SATUAN KERJA BULAN JANUARI TAHUN 2020

SATUAN KERJA : (400848) PENGADILAN AGAMA KARAWANG
K/L : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
NO./TGL DIPA : DIPA-005.01.2.400848/2020 tgl. 12-11-2019
SURAT : No. W10-A7/279 A /KU.04.2/1/2020 tgl. 31-01-2020

NO	Kode Satker. Program. Keg. Output. Kode Akun	Uraian	Pagu DIPA	Realisasi s.d bulan lalu		Realisasi bulan ini		Realisasi s.d bulan ini		Sisa dana s.d bulan ini	
				Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%
		BELANJA PEGAWAI	7.032.404.000,00	0,00	0,00	373.612.983,00	5,31	373.612.983,00	5,31	6.658.791.017,00	94,69
005.01.01.1066.994.001		Gaji dan Tunjangan	7.032.404.000,00	0,00	0,00	373.612.983,00	5,31	373.612.983,00	5,31	6.658.791.017,00	94,69
005.01.01.1066.994.001. A		Pembayaran Gaji dan Tunjangan	7.032.404.000,00	0,00	0,00	373.612.983,00	5,31	373.612.983,00	5,31	6.658.791.017,00	94,69
005.01.01.1066.994.001. A.511111		Beban Gaji Pokok PNS	1.844.253.000,00	0,00	0,00	119.607.640,00	6,49	119.607.640,00	6,49	1.724.645.360,00	93,51
005.01.01.1066.994.001. A.511119		Beban Pembelatan Gaji PNS	31.000,00	0,00	0,00	1.676,00	5,41	1.676,00	5,41	29.324,00	94,59
005.01.01.1066.994.001. A.511121		Beban Tunj. Suan/Istri PNS	152.941.000,00	0,00	0,00	9.350.270,00	6,11	9.350.270,00	6,11	143.590.730,00	93,89
005.01.01.1066.994.001. A.511122		Beban Tunj. Anak PNS	42.079.000,00	0,00	0,00	3.053.642,00	7,26	3.053.642,00	7,26	39.025.358,00	92,74
005.01.01.1066.994.001. A.511123		Beban Tunj. Struktural PNS	40.320.000,00	0,00	0,00	2.880.000,00	7,14	2.880.000,00	7,14	37.440.000,00	92,86
005.01.01.1066.994.001. A.511124		Beban Tunj. Fungsional PNS	3.745.700.000,00	0,00	0,00	189.990.000,00	5,07	189.990.000,00	5,07	3.555.710.000,00	94,93
005.01.01.1066.994.001. A.511125		Beban Tunj. PPh PNS	777.405.000,00	0,00	0,00	23.225.215,00	2,99	23.225.215,00	2,99	754.179.785,00	97,01
005.01.01.1066.994.001. A.511126		Beban Tunj. Beras PNS	103.257.000,00	0,00	0,00	6.300.540,00	6,10	6.300.540,00	6,10	96.955.460,00	93,90
005.01.01.1066.994.001. A.511129		Beban Uang Makan PNS	318.648.000,00	0,00	0,00	18.649.000,00	5,85	18.649.000,00	5,85	299.999.000,00	94,15
005.01.01.1066.994.001. A.511151		Beban Tunjangan Umum PNS	7.770.000,00	0,00	0,00	555.000,00	7,14	555.000,00	7,14	7.215.000,00	92,86
		BELANJA BARANG OPERASIONAL	1.490.714.000,00	0,00	0,00	118.477.314,00	7,95	118.477.314,00	7,95	1.372.236.686,00	92,05
005.01.01.1066.994.002		Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1.490.714.000,00	0,00	0,00	118.477.314,00	7,95	118.477.314,00	7,95	1.372.236.686,00	92,05
005.01.01.1066.994.002. A		Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran	477.926.000,00	0,00	0,00	12.195.000,00	2,55	12.195.000,00	2,55	465.731.000,00	97,45
005.01.01.1066.994.002. A.521111		Belanja Keperluan Perkantoran	422.860.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,01	48.000,00	0,01	422.812.000,00	99,99
		Honorarium pramus, pengemudi dan satpam	413.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.660.000,00	100,00
		Penggandaan dan penjilidan	2.000.000,00	0,00	0,00	48.000,00	2,40	48.000,00	2,40	1.952.000,00	97,60
		Langganan koran	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	100,00
		Percetakan informasi visual	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	100,00
005.01.01.1066.994.002. A.521119		Beban Operasional Lainnya	15.066.000,00	0,00	0,00	155.000,00	1,03	155.000,00	1,03	14.911.000,00	98,97
005.01.01.1066.994.002. A.521811		Persediaan Barang Konsumsi	40.000.000,00	0,00	0,00	11.992.000,00	29,98	11.992.000,00	29,98	28.008.000,00	70,02

NO	Kode Satker. Program. Keg. Output. Kode Akun	Uraian	Pagu DIPA	Realisasi s.d bulan lalu		Realisasi bulan ini		Realisasi s.d bulan ini		Sisa dana s.d bulan ini	
				Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%
005.01.01.1066.994.002. B		Langganan Daya dan Jasa	386.220.000,00	0,00	0,00	24.441.014,00	6,33	24.441.014,00	6,33	361.778.986,00	93,67
005.01.01.1066.994.002. B.521111		Belanja Keperluan Perkantoran	198.000.000,00	0,00	0,00	10.648.357,00	5,38	10.648.357,00	5,38	187.351.643,00	94,62
		Langganan Internet	195.400.000,00	0,00	0,00	10.648.357,00	5,45	10.648.357,00	5,45	184.751.643,00	94,55
		Langganan Web Hosting	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	100,00
		Langganan Domain	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00
005.01.01.1066.994.002. B.521114		Belanja Penglimuran Surat Dinas Pos Pusat	1.800.000,00	0,00	0,00	44.000,00	2,44	44.000,00	2,44	1.756.000,00	97,56
005.01.01.1066.994.002. B.522111		Belanja Langganan Listrik	162.420.000,00	0,00	0,00	12.600.610,00	7,76	12.600.610,00	7,76	149.819.390,00	92,24
005.01.01.1066.994.002. B.522112		Belanja Langganan Telepon	12.000.000,00	0,00	0,00	467.547,00	3,90	467.547,00	3,90	11.532.453,00	96,10
005.01.01.1066.994.002. B.522113		Belanja Langganan Air	12.000.000,00	0,00	0,00	680.500,00	5,67	680.500,00	5,67	11.319.500,00	94,33
005.01.01.1066.994.002. C		Pemeliharaan Kantor	241.388.000,00	0,00	0,00	44.411.300,00	18,40	44.411.300,00	18,40	196.976.700,00	81,60
005.01.01.1066.994.002. C.523111		Belanja biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	114.511.000,00	0,00	0,00	42.325.500,00	36,96	42.325.500,00	36,96	72.185.500,00	63,04
		- gedung kantor	113.470.000,00	0,00	0,00	42.325.500,00		42.325.500,00		37.30	71.144.500,00
		- halaman	1.041.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041.000,00	100,00
005.01.01.1066.994.002. C.523121		Belanja biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	126.877.000,00	0,00	0,00	2.085.800,00	1,64	2.085.800,00	1,64	124.791.200,00	98,36
		- komputer dan laptop	6.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750.000,00	100,00
		- printer	4.023.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.023.000,00	100,00
		- ac split	12.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.060.000,00	100,00
		- kendaraan roda 2	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	100,00
		- kendaraan roda 4	86.166.000,00	0,00	0,00	2.085.800,00	2,42	2.085.800,00	2,42	84.080.200,00	97,58
		- genset	7.878.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.878.000,00	100,00
005.01.01.1066.994.002. D		Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor	45.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.600.000,00	100,00
005.01.01.1066.994.002. D.521115		Beban Honor Operasional Satuan Kerja	45.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.600.000,00	100,00
		- Honor KPA	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	100,00
		- Honor PPK	7.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800.000,00	100,00
		- Honor PPPRM	7.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800.000,00	100,00
		- Honor Bend. Pengeluaran	6.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600.000,00	100,00
		- Honor Staf	14.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400.000,00	100,00
005.01.01.1066.994.002.E		Konsultasi	67.320.000,00	0,00	0,00	2.870.000,00	4,26	2.870.000,00	4,26	64.450.000,00	95,74
005.01.01.1066.994.002.E.524111		Beban Perjalanan Biasa	61.920.000,00	0,00	0,00	1.970.000,00	3,18	1.970.000,00	3,18	59.950.000,00	96,82
005.01.01.1066.994.002.F		Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.400.000,00	0,00	0,00	900.000,00	16,67	900.000,00	16,67	4.500.000,00	83,33
005.01.01.1066.994.002.F.522141		Biaya Sewa	268.800.000,00	0,00	0,00	34.560.000,00	12,86	34.560.000,00	12,86	234.240.000,00	87,14
005.01.01.1066.994.002.G		Belanja Sewa	268.800.000,00	0,00	0,00	34.560.000,00	12,86	34.560.000,00	12,86	234.240.000,00	87,14
005.01.01.1066.994.002.G. 524119		Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim	3.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.460.000,00	100,00
		Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	3.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.460.000,00	100,00
		- Uang Harian Perjalanan Dinas	2.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160.000,00	100,00
		- Transport Rakernas	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	100,00
		TOTAL	8.625.618.000,00	0,00	0,00	492.090.297,00	5,70	492.090.297,00	5,70	8.133.531.703,00	94,30



KARAWANG, 31 Januari 2020
Kuasa Pengguna Anggaran
ATO SUNARTO
NIP. 197208161994031002

Lampiran A.8

6/18/2020 - https://ppnp.mahkamahagung.go.id/ppnp/daporanRealisasi/print?periode=01&triwulan=1&month=1&year=2020&unit_code=04&af_satker=0&sak...

LAPORAN REALISASI PENDAPATAN PNBP

FORM 01

TAHUN : 2020
 BULAN : Januari
 NOMOR / TANGGAL DIRA : SP.DIPA-005.04.2.400849/2020 / 12-11-2019
 DEPARTEMEN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORGANISASI : DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
 PROPINSI / KABUPATEN : Prop. Jawa Barat / Kab. Karawang
 SATKER : PEMGADILAN AGAMA KARAWANG
 KPPN : KARAWANG

NO	MAP	URAIAN JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	VOLUME	TARIF [Rp]	JUMLAH PENERIMAAN (Rp)	JUMLAH DISTOR (Rp)
I	Pendapatan dari Permenihan Tinggangan BMN				0	0
	JUMLAH I				0	0
II	Pendapatan dari Penarafan BMN				0	0
	JUMLAH II				0	0
III	Pendapatan Jasa				0	0
	JUMLAH III				0	0
IV	Pendapatan Kejaksaan/Peradilan					
425231	Pendapatan Pengelahan Surat di Bawah Tangas					
425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan KEPAINTERAN (AINWA)	551	10.000	5.510.000	5.510.000	
425233	Pendapatan Objek Perkara					
	Pendaftaran Berkas Gugatan/ Permozonan/Perizinan/Visuman HAK KEPN/TERAN PASA FENGSHUI TINGKAT PERTAMA > PERADILAN AGAMA	475	30.000	14.250.000	14.250.000	
425239	Pendapatan Reksa dan Perilaku Lainnya					
	- Pendaftran Surat Keterangan insiden untuk Mewakili Pihak yang Bergerak di Pengadilan HAK KEPN/TERAN LAINNYA	246	10.000	2.460.000	2.460.000	
	- Penarafan dan Penyetahan Akta Censi yang Dibuat di Keperstuan pada Pengadilan Agama HAK KEPN/TERAN LAINNYA	501	10.000	5.010.000	5.010.000	
	- Relasi Putusan/Pengarahan HAK KEPN/TERAN PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA > PERADILAN AGAMA	367	10.000	3.670.000	3.670.000	
	- Relasi Pengajuan kepada Pengadilan Tingkat Pertama/Peradilan Agama HAK KEPN/TERAN INDIA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA > PERADILAN AGAMA	423	10.000	4.230.000	4.230.000	
	- Relasi Pengajuan kepada Terugug/Permozon/Terlaksana/Terbitnya HAK KEPN/TERAN INDIA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA > PERADILAN AGAMA	386	10.000	3.860.000	3.860.000	
	- Relasi Pemberitahuan Injaz kepada Pembanding HAK KEPN/TERAN INDIA PENGADILAN TINGKAT BANDING > PERADILAN UMUM DAN PERADILAN AGAMA	3	10.000	30.000	30.000	
	- Relasi Pemberitahuan Injaz kepada Banding HAK KEPN/TERAN INDIA PENGADILAN TINGKAT BANDING > PERADILAN UMUM DAN PERADILAN AGAMA	3	10.000	30.000	30.000	
	- Relasi Pemberitahuan Injaz kepada Pengadilan Tingkat Pertama/Peradilan Agama HAK KEPN/TERAN INDIA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA > PERADILAN AGAMA	306	10.000	3.060.000	3.060.000	
	- Relasi Pemberitahuan Injaz kepada Kepala Kejaksaan Negeri/Kejaksaan Agama HAK KEPN/TERAN INDIA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA > PERADILAN AGAMA	2	10.000	20.000	20.000	
	- Relasi Pengajuan Injaz kepada Kepala Kejaksaan Negeri/Kejaksaan Agama HAK KEPN/TERAN INDIA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA > PERADILAN AGAMA	1	10.000	10.000	10.000	
	- Relasi Pengajuan Injaz kepada Kepala Kejaksaan Negeri/Kejaksaan Agama HAK KEPN/TERAN INDIA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA > PERADILAN AGAMA	1	10.000	10.000	10.000	
	- Relasi Pengajuan Injaz kepada Kepala Kejaksaan Negeri/Kejaksaan Agama HAK KEPN/TERAN INDIA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA > PERADILAN AGAMA	1	10.000	10.000	10.000	
	JUMLAH IV				62.110.000	42.110.000
V	Pendapatan Denda I					
	JUMLAH V				0	0
VI	Pendapatan dari Penetapan Kembali Tahun Anggaran yang Lalu				0	0
	JUMLAH VI				0	0
VII	Pendapatan Pelajaran Platting				0	0
	JUMLAH VII				0	0
VIII	Pendapatan dari Penurunan Rekening				0	0
	JUMLAH VIII				0	0
IX	Pendapatan Lain-lain				0	0
	JUMLAH IX				0	0
X	Pendapatan atas pengelolaan BPN dan kelembagaan Agora dari Pengelola Banting				0	0
	JUMLAH X				0	0

https://ppnp.mahkamahagung.go.id/ppnp/daporanRealisasi/print?periode=01&triwulan=1&month=1&year=2020&unit_code=04&af_sak... 1/2

XI	Pendapatan Jasa Lainnya	JUMLAH XI		0	0
XII	Pendapatan Bunga	JUMLAH XII		0	0
XIII	Pendapatan Layanan Jasa Perbankan dan Penutupan Rekening			0	0
425764	Pendapatan Jasa Lembitaga Keuanginan Jasa Giro	JUMLAH XIII		0	0
XIV	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian	JUMLAH XIV		0	0
XV	Penerimaan Kembalikan Bantuan Tahun Anggaran Yang Lalu	JUMLAH XV		0	0
425912	Penerimaan Kembalikan Bantuan Tahun Anggaran Yang Lalu	JUMLAH XV		0	0
XVI	Pendapatan Sekesia Sisa Utang dari Penerimaan	JUMLAH XVI		0	0
XVII	Pendapatan Pengguna Hasil Produksi Non Liturgi	JUMLAH XVII		0	0
XVIII	Pendapatan Lain-lain II	JUMLAH XVIII		0	0
XIX	Bantuan Kejatuhan pada Mahkamah Agung RI - HAK UU MATERIEL	JUMLAH XIX		0	0
		JUMLAH I - XI-XIX		42.130.000	42.130.000



Karawang, 3 Februari 2020
Bendahara Penerimaan
PENGADILAN AGAMA KARAWANG
Ahmad Wasikto, S.E.I.
NIP. 197606082009041003

LAPORAN REALISASI PENDAPATAN PNBP

FORM 01A

TAHUN : 2020
 BULAN : Januari - Januari
 NOMOR / TANGGAL DIPA : SP-DIPA-005.04.2.400849/2020 / 12-11-2019
 DEPARTEMEN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORGANISASI : DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
 PROPINSI / KABUPATEN : Prop. Jawa Barat / Kab. Karawang
 SATKER : PENGADILAN AGAMA KARAWANG
 KPPN : KARAWANG

NO	MAP	URAIAN JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	TARGET	JUMLAH VOLUME BULAN INI	TARIF PER VOLUME BULAN INI (Rp)	JUMLAH S/D BULAN YANG LALU (Rp)	JUMLAH PENERIMAAN BULAN INI (Rp)	JUMLAH PENERIMAAN S/D BULAN INI (Rp)
I	Pendapatan dari Pemindahan tanggungan BMN	JUMLAH I		0		0	0	0
II	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN	JUMLAH II		0		0	0	0
III	Pendapatan Jasa	JUMLAH III		0		0	0	0
IV	Pendapatan Kejaksaan/Peradilan	JUMLAH IV		0		0	42.130.000	42.130.000
425232	Pendapatan Uang Meja (Legesi) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	0	551	10.000	0	5.510.000	5.510.000	
425231	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	0	2237	10.000	0	22.370.000	22.370.000	
425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0	475	30.000	0	14.250.000	14.250.000	
425233	Pendapatan Ongkos Perkara	0						
V	Pendapatan Denda I	JUMLAH V		0		0	0	0
VI	Pendapatan dari Penerimaan Kembali Tahun Anggaran yang Lalu	JUMLAH VI		0		0	0	0
VII	Pendapatan Pelunasan Piutang	JUMLAH VII		0		0	0	0
VIII	Pendapatan dari Penutupan Rekening	JUMLAH VIII		0		0	0	0
IX	Pendapatan Lain-lain	JUMLAH IX		0		0	0	0
X	Pendapatan atas pengelolaan BMN dan Kekayaan Negara dari Pengelola Barang	JUMLAH X		0		0	0	0
XI	Pendapatan Jasa Lainnya	JUMLAH XI		0		0	0	0
XII	Pendapatan Bunga	JUMLAH XII		0		0	0	0

	JUMLAH XII	0	0	0	0
XIII	Pendapatan Layanan Jasa Perbankan dan Penutupan Rekening				
	425764 Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)				
	JUMLAH XIII	0	0	0	0
XIV	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara				
	JUMLAH XIV	0	0	0	0
XV	Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu I				
	425912 Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu				
	JUMLAH XV	0	0	0	0
XVI	Pendapatan Setoran Sisa Utang dari Pensiunan				
	JUMLAH XVI	0	0	0	0
XVII	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang				
	JUMLAH XVII	0	0	0	0
XVIII	Pendapatan Lain-lain II				
	JUMLAH XVIII	0	0	0	0
XIX	Hak Keparietaan pada Mahkamah Agung RI - HAK UU MATERIIL				
	JUMLAH XIX	0	0	0	0
	JUMLAH I s/d XIX	0	0	42.130.000	42.130.000


 Mengetahui
 Sekretaris
PENGADILAN AGAMA KARAWANG

 Karawang, 3 Februari 2020
 Bendahara Penerimaan
PENGADILAN AGAMA KARAWANG
 Ahmad Waskito, S.E.I.
 NIP. 197606082009041001

Activate Win
Go to Settings tc

Lampiran A.9

LAPORAN PELAKSANAAN SIDANG DI LUAR GEDUNG PADA PENGADILAN AGAMA KARAWANG BULAN MEI 2020

LIPA.14

NO	PAGU AWAL	PAGU REVISI	REALISASI S/D BULAN LALU	REALISASI BULANINI	JUMLAH	SISA	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH PERKARA	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	3400000	0	2912000	0	2912000	3108000	2	42	Target 20 Kegiatan

Mengetahui:
 Ketua Pengadilan Agama Karawang
 TTD
Dr. M. Basir, M.H.
 NIP.196507021992031005

29 Mei 2020
 Panitera
 TTD
Drs. E. Arifudin
 NIP.19631115199301004

Lampiran Dokumen Masukan Sistem Usulan

Lampiran B.1

The screenshot shows a web application interface for managing documents. At the top, there is a header with the logo of the Pengadilan Agama Karawang on the left and a user profile icon on the right. Below the header, a dark navigation bar contains four items: 'Kategori' (with a smartphone icon), 'Operasional' (with a gear icon), 'Tentang' (with an 'i' icon), and 'Eviden2' (with an 'i' icon). To the right of the navigation bar, there is a 'File' link. The main content area is titled 'DAFTAR FILE' and displays a table with one row. The table has columns for '#', 'Format', 'Nama File', and 'Download'. The first row shows a file entry with #1, PDF|DOCX|RTF format, the name 'gugatan', and a blue download button. At the bottom of the page, there is a watermark that reads 'Activate Windows Go to Settings to activate Windows.' and the copyright notice '2019 © WAP Pengadilan Agama Karawang'.

#	Format	Nama File	Download
1	PDF DOCX RTF	gugatan	

Lampiran B.2

The screenshot shows a web-based application interface. At the top, there is a dark header bar with several icons and menu items: a circular logo on the left, followed by 'Kategori', 'Operasional', 'Tentang', 'Eviden2', and a user icon on the right. Below the header is a navigation bar with a 'File' link. The main content area contains a table titled 'DAFTAR FILE'. The table has four columns: '#', 'Format', 'Nama File', and 'Download'. There is one entry: '# 1', 'Format PDF|DOCX|RTF', 'Nama File permohonan', and a blue 'Download' button. At the bottom of the page, there is a watermark that reads 'Activate Windows Go to Settings to activate Windows.' and the copyright notice '2019 © WAP Pengadilan Agama Karawang'.

Lampiran B.3

The screenshot shows a web-based application interface, similar to Lampiran B.2. It features a dark header bar with a circular logo, 'Kategori', 'Operasional', 'Tentang', 'Eviden2', and a user icon. A 'File' link is in the navigation bar. The main content area has a table titled 'DAFTAR FILE' with columns '#', 'Format', 'Nama File', and 'Download'. One entry is listed: '# 1', 'Format PDF|DOCX|RTF', 'Nama File Ralas panggilan', and a blue 'Download' button. A watermark at the bottom encourages activation with the message 'Activate Windows Go to Settings to activate Windows.' and the copyright notice '2019 © WAP Pengadilan Agama Karawang'.

Lampiran B.4

The screenshot shows a web-based application interface. At the top left is the logo of the Pengadilan Agama Karawang. At the top right is a user profile icon. The top navigation bar includes links for 'Kategori' (Category), 'Operasional' (Operational), 'Tentang' (About), 'Eviden2' (Evidence 2), and a 'File' link with a dropdown arrow. Below the navigation is a table titled 'DAFTAR FILE' (FILE LIST) with columns for '#', 'Format', 'Nama File' (File Name), and 'Download'. One entry is listed: '# 1 Format PDF|DOCX|RTF Nama File relaas pbt Download' (with a blue download icon). At the bottom right of the page are activation notices for Windows and a copyright notice: '2019 © WAP Pengadilan Agama Karawang'.

Lampiran B.5

The screenshot shows a web-based application interface, identical to Lampiran B.4. It features the same top navigation, table structure, and footer information. The table lists one file entry: '# 1 Format PDF|DOCX|RTF Nama File bas Download'. The footer includes activation notices for Windows and a copyright notice: '2019 © WAP Pengadilan Agama Karawang'.

Lampiran B.6

The screenshot shows a web application interface. At the top, there is a header with a logo on the left, followed by four menu items: 'Kategori' (Category), 'Operasional' (Operational), 'Tentang' (About), and 'Eviden2'. To the right of the menu is a user profile icon. Below the header is a breadcrumb navigation bar with the text 'File'. The main content area is titled 'DAFTAR FILE' and contains a table with one row. The table has columns for '#', 'Format', 'Nama File', and 'Download'. The first row shows a value of '1' in the '#' column, 'PDF|DOCX|RTF' in the 'Format' column, 'upaya hukum' in the 'Nama File' column, and a blue download button in the 'Download' column. At the bottom of the page, there is a watermark that reads 'Activate Windows' and 'Go to Settings to activate Windows.', along with the copyright notice '2019 © WAP Pengadilan Agama Karawang'.

Lampiran Dokumen Keluaran Sistem Usulan

Lampiran B.7

CONTOH FORMAT SURAT GUGATAN CERA!
Diketik ulang rangkap 8 (delapan), diketik dengan KOMPUTER.
Tidak boleh ada (titik-titik), dan tidak diisi dengan tulisan tangan.

Hal : **Gugatan Cerai**

Sleman,

Kepada
Yth. Ketua Pengadilan Agama Sleman
di-SLEMAN

Assalamu'alaikum wr. wb.
Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Binti.....
Umur :
Agama :
Pendidikan terakhir:
Pekerjaan :
Tempat kediaman di :
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat

Dengan hormat, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap suami saya:

Nama : Binti.....
Umur :
Agama:
Pendidikan terakhir:
Pekerjaan :
Tempat kediaman di :
**(Bila Suami anda tidak diketahui tempat tinggalnya lagi atau GHOIB,
maka tuliskan alamat terakhir suami anda ditambah dengan "sekarang
tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti diseluruh wilayah
Republik Indonesia")**
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Adapun alasan/dalil - dalil gugatan Penggugat sebagai berikut :

- Bawa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal , dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan sesuai

Lampiran B.8

Depok, 01 Desember 2015

Ke pada YTH,

KETUA PENGADILAN NEGRI KOTA DEPOK

JL. Boulevard Sektor Anggrek, komplek Perkantoran Kota Kembang No.7 Kalimulya Cilodong,
Kota Depok Jawa Barat.

Perihal : GUGATAN CERAI

Dengan Hormat

Saya yang bertandatangan dibawah ini,

Nama : **Jipri Apriliany**
Jenis Kelamin : **Perempuan**
Tempat Tanggal Lahir : **Banjarmasin , 21 Agustus 1981**
Agama : **Kristen Protestan**
Pekerjaan : **Ibu Rumah Tangga**
Alamat (KTP) : **JL. Siliwangi NO. 77 RT/RW 021/011 Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas.**
Alamat Domisili : **JL. Raya Pemda Perumahan Puri Nirwana 4, Blok AT No. 112 RT/RW 011/044
Kelurahan Sukahati , Kecamatan Cibinong , Kabupaten Bogor.**

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**

Bermaksud mengajukan Gugatan Cerai di Pengadilan Negri Depok, terhadap suami

Nama : **Djabalan Emill Laukon**
Jenis Kelamin : **Laki-Laki**
Tempat Tanggal Lahir : **Ambon , 3 Januari 1975**
Agama : **Kristen Protestan**

Lampiran B.9

SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 0223/Pdt.G/2007/PA.JP

Pada hari ini Jum'at tanggal 04 Mei 2007 saya **HS. SHALAHUDDIN, SH.** Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama tersebut :

TELAH MEMANGGIL

Nama : **DADANG JULIADIDJAJA BIN SUKMA WIJAYA**
Umur : 50 tahun, agama Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Tempat kediaman di : Jalan Cempaka Baru VII RT.002 RW. 07 No. 43 Kelurahan Cempaka Baru Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat Dan saat ini tidak diketahui alamatnya baik di wilayah Indonesia maupun di luar negeri (ghoib),
Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia. Sebagai "Tergugat";

Dalam perkara perdata Nomor : 0223/Pdt.G/2007/PA.JP antara :

MARDIASTUTI BINTI MOELYONO, sebagai Penggugat;
melawan
DADANG JULIADIDJAJA BIN SUKMA WIJAYA, Sebagai Tergugat;

Supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat Jl. KH. Mas Mansyur/Awaluddin II/2 Tanah Abang, Jakarta Pusat pada hari Selasa tanggal 04 September 2007 pukul 09.00 WIB untuk pemeriksaan perkara perdata;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan Perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dan atas Gugatan Perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui media Website Badan Peradilan Agama (BADILAG) RI di Jakarta, supaya dionlinekan, agar diketahui oleh yang bersangkutan;

Demikian Surat Panggilan Sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.

Jurusita Pengganti

HS. SHALAHUDDIN, SH.

Lampiran B.10

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN

Nomor : 4/Pdt.G/2018/PA.Kras.

Pada hari ini Jumat tanggal 6 Juli 2018, saya
Ida Ayu Md Indrayani, S.Kom. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama
Karangasem atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama tersebut :

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Istyorini binti Totok Widyanto, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 09 Agustus
1973, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jln. Moh. Zakaria,
Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kabupaten Depok, Jawa Barat
sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh
wilayah Republik Indonesia, sebagai "Termohon";
Dalam perkara permohonan Nomor : 4/Pdt.G/2018/PA.Kras. antara :

Amran bin Sariman, sebagai Pemohon;

melawan

Istyorini binti Totok Widyanto, sebagai Termohon;

tentang Putusan Pengadilan Agama Karangasem tanggal 4 Juli 2018 Nomor :
4/Pdt.G/2018/PA.Kras. yang amarnya berbunyi berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Amran bin Sariman) untuk menjatuhkan talak satu rai'i terhadap Termohon (Istyorini binti Totok Widyanto) di depan sidang Pengadilan Agama Karangasem;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 574.500,- (lima ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Bahwa, atas putusan di atas ia dapat mengajukan perlawan/verzet dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan isi putusan ini;

Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Bupati Karangasem, sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR, karena Tergugat tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, dan disana saya bertemu dan berbicara dengan Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Karangasem.

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini;

Demikian Surat Pemberitahuan ini dibuat yang ditandatangani oleh saya dan Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Karangasem, kemudian pada hari itu juga Surat Pemberitahuan ini ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Karangasem;

Am. Sekda Kab. Karangasem
Yang menerima,
SETDA
DILKA SURAWATHA

Jurusita Pengganti,
PENGADILAN AGAMA
IDA AYU MD INDRAYANI, S.KOM.

Lampiran B.11

BERITA ACARA PERSIDANGAN PADA PENGADILAN AGAMA

Oleh :

Drs. H. Abu Amar, SH.,MH.

I. Pendahuluan

Sifat acara pemeriksaan perkara di hadapan persidangan Pengadilan di Indonesia berdasarkan Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) untuk Jawa dan Madura dan Rechtsreglement Buitengewesten (RBg) untuk luar Jawa dan Madura, dilakukan secara lisan (mondelinge procedure).

Acara dengan lisan berarti, bahwa pemeriksaan perkara dilakukan dengan cara kontak langsung berupa tanya jawab dengan lisan antara hakim dengan para pihak atau kuasanya di muka persidangan. Hakim juga mendengarkan sendiri keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak, keterangan saksi ahli apabila diperlukan dan lain-lainnya.

Bahkan Hakim dalam setiap perkara perdata, apabila kedua belah pihak hadir di persidangan, wajib mendamaikan kedua belah pihak. (Pasal 154 RBg / 130 HIR). Hakim juga berhak untuk memberikan penerangan (penasehatan) kepada kedua belah pihak mengenai cara berperkara atau upaya hukum yang dapat ditempuh agar supaya perkara berjalan baik dan teratur. (Pasal 156 RBg / 132 HIR). Kewajiban mendamaikan dan memberikan penasehatan tersebut tentu saja dilakukan secara lisan.

Atas dasar sifat acara pemeriksaan seperti itu, maka hakim dalam melaksanakan tugas pokoknya memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan oleh para pencari keadilan kepadanya, memerlukan seseorang untuk membantu mencatat hasil pemeriksannya. Undang-undang menentukan bahwa pekerjaan tersebut diberikan kepada Panitera atau seorang yang ditugaskan melakukan pekerjaan Panitera yang berkewajiban membantu Hakim dengan menghadiri dan mencatat jalannya sidang pengadilan. Berdasarkan catatan yang dibuat oleh Panitera disusun berita acara persidangan, yang sangat berguna bagi Hakim dalam menyusun putusan pengadilan. Oleh karena pentingnya berita acara persidangan, maka pembuatan / penyusunannya harus dilakukan dengan cermat, teliti dan hati-hati, agar nilainya benar-benar terjaga.

Lampiran B.12

UPAYA HUKUM BANDING TERHADAP PUTUSAN PERADILAN AGAMA

Dewi Rahmat Tika¹

A. Pendahuluan

Pengadilan Agama (biasa disingkat: PA) merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di Ibu Kota, Kabupaten atau Kota. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Agama memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam.

Dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama ada suatu proses atau tata cara yang harus diikuti. Yang dinamakan Hukum Acara Peradilan Agama adalah perkara yang mencakup segala peraturan perundang-undangan negara maupun syariat Islam, yang mengatur bagaimana cara orang bertindak ke muka Pengadilan Agama sampai mendapatkan hasil atau putusan dari Pengadilan Agama tersebut.

Dalam persidangan pastilah ada yang bersengketa dan menginginkan keadilan bagi dirinya, apabila salah satu pihak yang berperkara di muka Pengadilan Agama merasa tidak puas atas keputusan Pengadilan Agama, yang bersangkutan atau kuasa sahnya dapat menempuh upaya hukum menurut cara-cara yang diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan. Upaya hukum biasa yaitu verzet, banding, dan kasasi, sedangkan upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali atas putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Salah satu upaya hukum yang biasa adalah banding. Lembaga banding diadakan oleh pembuat Undang-Undang, karena dikawatirkan hakim adalah manusia biasa yang dapat membuat kesalahan dalam mengajukan suatu putusan. Oleh karena itu, dibuka kemungkinan bagi orang yang dikalahkan untuk mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi Agama. Dengan diajukannya permohonan banding, perkara menjadi mentah lagi.

¹Mahasiswa Kelas HES 5F, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta, NIM 162111207.